

**IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK PROGRAM KERJA BINMAS
AIR DAN POTDIRGA KEGIATAN SAMBANG NUSA DI PULAU
MANDANGIN SAMPANG JAWA TIMUR**

Dina Catur Ayu Ningtyas

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
dinacaturan06@gmail.com

Adi Soesiantoro

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
adisusiantoro07@gmail.com

ABSTRAK

Kondisi geografis Negara Indonesia yang dua pertiganya adalah merupakan wilayah perairan, telah memberikan peluang sekaligus tantangan. Wilayah perairan Indonesia menyimpan sumber kekayaan alam dan sumber daya alam yang apabila dikelola dengan baik akan menjadi peluang, harapan, potensi dan prospek untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan, namun kondisi itu dibarengi dengan berbagai ancaman potensial dan ancaman faktual/nyata seperti tindak pelanggaran dan tindak kejahatan di wilayah perairan yang cukup tinggi intensitasnya. Program kerja Binmas air dan Potdirga melalui kegiatan Sambang Nusa menjadi strategi utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir dan kepulauan yang terpinggirkan. Dalam konteks pelayanan publik kegiatan Sambang Nusa menjanjikan solusi inovatif yang dapat mengatasi tantangan tersebut. Abstrak ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi pelayanan publik program kerja Binmas air dan Potdirga sebagai penyelenggaraan fungsi kepolisian perairan dalam bentuk meningkatkan kehadiran polisi perairan pada pulau terluar yang berpenghuni guna meningkatkan rasa aman masyarakat serta bertujuan untuk memberdayakan potensi masyarakat atau komunitas masyarakat di wilayah perairan dan pesisir pantai yang dapat mendukung terciptanya kamtibmas yang kondusif. Implementasi pelayanan publik Program kerja Binmas air dan Potdirga dalam kegiatan Sambang Nusa telah membawa dampak positif dalam berperan aktif menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah pesisir Jawa Timur guna membangun dan menciptakan stabilitas keamanan serta ketertiban masyarakat di wilayah pesisir maupun perairan. Kegiatan Sambang Nusa memberikan dampak sosial bagi masyarakat setempat karena di dalam kegiatannya terdapat beberapa sub-giat seperti klinik terapung, perpustakaan terapung, sosialisasi dan penyuluhan, serta pemberian bantuan sosial kepada nelayan pesisir di Pulau Mandangin Sampang Jawa Timur. Penelitian ini memfokuskan pentingnya penerapan pelayanan publik pada wilayah pesisir daerah pulau yang ada di Jawa Timur yang sangat jauh akses mobilitasnya. Dalam kegiatan Sambang Nusa ini sebagai cara untuk meningkatkan keamanan, ketertiban serta kesejahteraan masyarakat dengan melakukan Upaya Pre-Emtif, Upaya Preventif dan Upaya Represif. Dan Edukatif. Namun, untuk mencapai dampak yang lebih luas, diperlukan dukungan atau kerja sama yang berkelanjutan dari pemerintah, pemangku kepentingan lokal, dan masyarakat setempat. Dengan demikian, Pelayanan publik pada program kerja melalui kegiatan Sambang Nusa

bisa membangun dan memberikan pelayanan serta dampak pada masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci : *Pelayanan Publik, Sambang Nusa, Pesisir*

ABSTRACT

Labor- The geographical condition of the Indonesian State, two-thirds of which are water areas, has provided both opportunities and challenges. Indonesian waters hold natural resources and natural resources which, if managed properly, will become opportunities, hopes, potentials and prospects for realising prosperity and welfare, but these conditions are accompanied by various potential threats and factual / real threats such as violations and crimes in the waters that are quite high in intensity. The Binmas Air and Potdirga work programme through Sambang Nusa activities is the main strategy in an effort to improve the welfare of communities in marginalised coastal and island areas. In the context of public services, Sambang Nusa activities promise innovative solutions that can overcome these challenges. This abstract aims to evaluate the implementation of the public service of the Binmas air and Potdirga work programme as the implementation of the water police function in the form of increasing the presence of water police on inhabited outer islands in order to increase the sense of community security and aims to empower the potential of the community or community in the waters and coastal areas that can support the creation of conducive kamtibmas. The implementation of the public service work programme of Binmas Air and Potdirga in Sambang Nusa activities has brought a positive impact in playing an active role in creating a conducive kamtibmas situation in the coastal areas of East Java in order to build and create stability of security and public order in coastal and water areas. Sambang Nusa activities have a social impact on the local community because in its activities there are several sub-activities such as floating clinics, floating libraries, socialisation and counselling, as well as providing social assistance to coastal fishermen on Mandangin Island Sampang East Java. This research focuses on the importance of implementing public services in coastal areas of island areas in East Java that are very far from mobility access. In this Sambang Nusa activity as a way to improve security, order and community welfare by making Pre-Emptive Efforts, Preventive Efforts and Repressive Efforts. And educative. However, to achieve a broader impact, it requires the continued support or cooperation of the government, local stakeholders and the local community. Thus, public services on work programmes through Sambang Nusa activities can build and provide services and impacts on communities that are more inclusive and sustainable.

Keywords : *Public Services, Sambang Nusa, Coastal*

A. PENDAHULUAN

Kemajuan Ilmu pengatuhan dan teknologi khususnya teknologi informasi membuat bangsa Indonesia makin peka terhadap berbagai isu global terutama berkenaan dengan demokratisasi, HAM dan lingkungan hidup. Reformasi kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat sipil yang demokratis

sebagai salah satu perwujudannya menuntut adanya perubahan dalam berbagai bidang terutama dalam bidang pelayanan kepada masyarakat pulau terpencil. Dalam era reformasi tuntutan masyarakat kepada Polri untuk melakukan berbagai perubahan mendapat perhatian pimpinan Polri, maka disusunlah Grand Strategi Polri sebagai pedoman melaksanakan reformasi di tubuh Polri guna mewujudkan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas - tugas kepolisian baik dalam pelayanan, perlindungan, pengayoman dan penegakan hukum. Guna menumbuhkan tingkat kesadaran masyarakat perairan, dilakukan berbagai upaya agar masyarakat memahami dan bersedia ikut serta dalam menciptakan Kamtibmas. Wilayah perairan Indonesia khususnya Madura Sampang pada umumnya memiliki potensi kekayaan alam yang terdapat di dasar laut dan tanah dibawahnya yang melimpah. Namun, perairan Madura Sampang juga rawan dijadikan aksi penyelundupan, diantaranya narkoba, binatang langka, aksi tindak pidana lainnya, seperti illegal fishing atau penyelundupan ikan, illegal oil atau penyelundupan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan human trafficking atau para pencari suaka serta People smuggling.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menegaskan bahwa geopolitik Indonesia dibawah masa kepemimpinannya akan membawa Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia yaitu membangun Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai Bangsa Maritim serta pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, pemberdayaan seluruh potensi maritim demi kemakmuran bangsa. Menyadari akan situasi dan kondisi dimaksud, maka Ditpolairud Polda Jatim memandang perlu untuk melakukan upaya atau langkah dalam menghadirkan kekuatan Kepolisian Perairan pada pulau-pulau terluar yang berpenghuni guna memberikan rasa aman kepada masyarakat setempat dengan bentuk kegiatan Sambang Nusa. Sambang Nusa adalah merupakan salah satu penyelenggaraan fungsi kepolisian perairan dalam bentuk meningkatkan kehadiran polisi perairan pada pulau terluar yang berpenghuni guna meningkatkan rasa aman masyarakat serta bertujuan untuk memberdayakan potensi masyarakat atau komunitas masyarakat di wilayah perairan dan pesisir pantai yang dapat mendukung terciptanya kamtibmas yang kondusif. Dengan adanya kegiatan Sambang Nusa ini, diharapkan masyarakat nelayan tradisional di pesisir dan pantai serta kelompok-kelompok nelayan mampu berperan aktif dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah pesisir Jawa Timur guna membangun dan menciptakan stabilitas keamanan serta ketertiban masyarakat di wilayah pesisir maupun perairan.

Jadi, Secara umum dan berdasarkan trend gangguan KAMTIBMAS di wilayah hukum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jatim pada tahun 2024 bila dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023 dari segi kuantitas mengalami penurunan jumlah kejadian dengan adanya upaya peningkatan aktivitas di wilayah hukum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jatim dalam hal penindakan, pemberdayaan patroli perairan, Polmas perairan dan Sambang Nusa akan lebih efektif di dalam menekan tindak pidana untuk menciptakan dan memelihara Keamanan dan Ketertiban masyarakat perairan. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas operasionalnya secara struktural diharapkan dukungan legalitas dan kerangka politik dalam mengawal tugas Polair. Pentingnya penguatan

pengawasan lingkungan sistem pemerintahan dan politik, agar Polair dapat bergerak di lapangan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Pentingnya untuk memahami sistem pemerintah dan politik suatu era untuk memahami dan menjelaskan perilaku, kinerja, dan organisasi Polair itu sendiri. Untuk mencapai pemenuhan kebutuhan sistem maka diperlukan suatu tindakan fungsionalisme struktural bahwa fungsi dijabarkan dalam empat sistem yaitu pertama, adaptation (adaptasi): sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat dan sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya; Kedua, goal attainment (pencapaian tujuan): sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya; Ketiga, integration (integrasi): sebuah sistem harus mengatur dan mengelola antarhubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya; Keempat, latency (latensi atau pemeliharaan pola) adalah sebuah sistem harus dilengkapi pemeliharaan dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan Reformasi Birokrasi Polri, Dit Polair Polda Jatim melakukan terobosan kreatif.

Pelayanan publik di wilayah pesisir merupakan bagian penting dari upaya kepolisian perairan terutama Binmas air dan Potdirga dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pada wilayah pesisir, pelayanan publik dapat mencakup berbagai aspek, termasuk pelayanan teknis terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, seperti pengelolaan sungai dan pantai. Selain itu, pelayanan publik juga melibatkan hubungan antara kepolisian perairan dan pemerintah dengan masyarakat, di mana memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa pelayanan publik di wilayah pesisir terintegrasi dengan baik, termasuk dalam hal digitalisasi. Digitalisasi dalam pelayanan publik diakui sebagai solusi yang dapat meningkatkan efisiensi, namun harus terintegrasi dengan baik agar memberikan manfaat maksimal. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui kegiatan Sambang Nusa di wilayah pesisir Pulau Mandangin Sampang Madura merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik.

Kegiatan sambang Nusa Pesisir adalah upaya untuk menjaga dan memahami kehidupan masyarakat pesisir serta ekosistem laut yang menjadi sumber kehidupan mereka. Melalui sambang Nusa Pesisir, kita dapat menggali pengetahuan tentang kearifan lokal dalam memanfaatkan sumber daya alam dengan berkelanjutan, serta memahami tantangan yang dihadapi oleh masyarakat pesisir dalam menghadapi perubahan iklim dan industrialisasi. Selain itu, kegiatan ini juga memungkinkan kita untuk menjalin kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat lokal dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, sambang Nusa Pesisir menjadi penting dalam memahami dan menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir. Pelayanan publik di wilayah pesisir memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Peningkatan kualitas

pelayanan publik merupakan upaya nyata untuk memastikan bahwa masyarakat di wilayah pesisir mendapatkan pelayanan yang baik dan merata. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, penyelenggara pelayanan publik berkewajiban untuk menyusun dan menetapkan standar pelayanan serta memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik juga menjadi hal yang penting. Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 menekankan bahwa pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan publik dapat disampaikan dalam bentuk masukan, tanggapan, laporan, dan/atau pengaduan kepada penyelenggara dan atasan langsung penyelenggara serta pihak terkait. Dalam konteks wilayah pesisir, asas pelayanan informasi publik yang bersifat transparan dan akuntabel juga menjadi kunci dalam memastikan aksesibilitas informasi dan pelayanan yang adil bagi masyarakat. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah pesisir harus memperhatikan aspek-aspek tersebut untuk menciptakan pelayanan yang merata dan bermutu. Dengan memahami tantangan dan peluang yang ada kepolisian perairan mecetuskan program kerja Binmas air dan Potdirga melalui kegiatan Sambang Nusa yang merupakan arahan dari Kabaharkam Polri. terkait dengan implementasi pelayanan ini, diharapkan dapat bisa membangun dan memberikan pelayanan serta dampak pada masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan secara keseluruhan.

Dan dengan adanya Magang atau Praktikum Kerja Lapangan adalah salah satu program Kampus Merdeka yang dilakukan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang dirancang untuk memastikan mahasiswa mendapatkan ketrampilan dan kompetensi utama, terbaik, dan kompetensi utama, terbaik, dan terkini untuk memastikan mahasiswa mendapatkan keterampilan dan kompetensi utama, terbaik, dan terkini untuk menghadapi dunia masa depan. Pada program ini memberikan kesempatan mahasiswa atau untuk melakukan magang di Instansi Kepolisian Air dan Udara tepatnya Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Jatim dengan tujuan untuk mendapatkan pengalaman, meningkatkan kemampuan skill yang mandiri, dan membantu serta menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang mereka pelajari di perguruan tinggi dalam dunia nyata yang relevan dengan bidang studi mereka.

B. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan untuk jurnal ini adalah metode kualitatif dengan metode pengumpulan data yang dilakukan secara observasi mengemukakan pendapat bahwa penelitian kualitatif adalah langkah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau ucapan, serta perilaku orang yang diamati. Penelitian ini bertujuan mendapatkan pemahaman yang bersifat umum terhadap kenyataan sosial dari sudut pandang partisipan. Bogdan & Biklen, s (1992: 21) menurut pendapat ini sesuai dengan fakta-fakta di lapangan menjelaskan penelitian kualitatif adalah penelitian dengan tujuan untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami subyek penelitian secara menyeluruh dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata serta bahasa, pada konteks khusus yang dialami serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Moloeng, (2007).

Lokasi penelitian program magang (PKL) bertempat di Pulau Mandangin yaitu Desa Mandangin Kabupaten Sampang Madura.

Objek penelitian yakni Desa Mandangin Kabupaten Sampang Madura dengan subyek penelitiannya adalah Kepolisian Air dan Udara Wilayah Jawa Timur yang melakukan program kerja kegiatan Sambang Nusa guna memberikan pelayanan publik untuk mensejahterakan rakyat.

Penelitian ini berfokus pada pengamatan penelitian sehingga observasi dan analisis lebih terarah. Fokus penelitian ini adalah pelayanan publik pada masyarakat wilayah pesisir khususnya Pulau Mandangin Kabupaten Sampang Madura oleh Kepolisian Air dan Udara dengan memberikan beberapa pelayanan seperti klinik terapung, perpustakaan terapung, bantuan sosial, dan penyuluhan serta sosialisasi harkamtibmas.

Kegiatan magang yang dilakukan selama 40 hari terhitung dari 10 Maret 2024 sampai dengan 08 Mei 2024. Di hari Senin sampai dengan Jumat dimulai pukul 08.00 – 16.00. Pada hari Rabu dan Kamis tanggal 17-18 April 2024 dilakukan kegiatan Sambang Nusa yang menjadi kegiatan rutin bulanan oleh unit Binmas air dan Potdirga.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam melaksanakan program kerja kegiatan Sambang Nusa yang sudah dilaksanakan pada taun 2023 melalui Surat Telegram Kakorpolairud Baharkam Polri Nomor: ST/323/VIII/HUK.7./2023 tanggal 7 Agustus 2023 tentang Pemetaan wilayah yang terdapat Pulau terluar yang akan dijadikan wilayah Binaan Polairud, maka Ditpolairud Polda Jatim melakukan pelayanan publik kepada masyarakat peisir dengan program kerja meliputi mulai dari penertiban dan penegakan hukum di wilayah pesisir, melaksanakan kegiatan Binluh kepada masyarakat pesisir dalam rangka membangun partisipasi masyarakat dalam menciptakan kamtibmas serta kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap potensi ancaman/gangguan keamanan, ketertiban dan ketentraman di lingkungannya, bantuan sosial untuk kesejahteraan masyarakat, serta program unggulan Kabaharkam Polri dengan memberikan pelayanan tambahan untuk anak-anak pesisir dalam hal pengetahuan dengan memberikan bantuan buku serta menyediakan perpustakaan terapung, serta memberikan pelayanan kesehatan dengan melayani konsultasi, pemeriksaan, serta bantuan obat pada masyarakat di wilayah Pulau Mandangin Kabupaten Sampang Madura. Dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Kepolisian Air dan Udara Polda Jatim. Menurut Bapak AKBP Budi Sulistyanto, S.H. selaku Subditpatroliairud Ditpolairud Polda Jatim, bahwa dalam memberikan pelayanan masyarakat pesisir serta menangani Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam di wilayah hukum Polda Jatim, terdapat tiga (3) upaya yang dilakukan yaitu meliputi Upaya Pre-Emtif, Upaya Preventif dan Upaya Represif.

Upaya Pre-Emtif yang dimaksud adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Jatim, untuk mencegah terjadinya tindak pidana di wilayah perairan Polda Jatim. Upaya Pre-Emtif yang dilakukan oleh Ditpolairud Polda Jatim adalah dengan, menanamkan nilai-nilai serta norma yang baik kepada masyarakat dengan harapan norma-norma tersebut dapat terinternalisasi dalam diri masyarakat. Upaya preventif

yang dilakukan oleh Ditpolairud Polda Jatim, secara khusus ditangani oleh SubditPatroli Perairan dan Udara (Subditpatroliairud), yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sibinmasair dan Portiga, yang bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan kerja sama dengan instansi terkait dalam Binmas perairan, pesisir, pantai dan potensi masyarakat dirgantara, melalui programprogram seperti; Pemolisian Masyarakat (Polmas) Perairan, Sambang Nusa, dan Pembinaan Keamanan Swakarsa Masyarakat Pesisir Pantai di wilayah Provinsi Jawa Timur (BIMKAMSA) yang diuraikan sebagai berikut:

a. Pemolisian Masyarakat (Polmas) Perairan.

Wujud Polmas Perairan yang dilaksanakan oleh Ditolairud Polda Jatim, khususnya SubditPatroli Perairan dan Udara (Subditpatroliairud) mencakup kesadaran masyarakat pantai (nelayan), kawasan kegiatan bisnis (pasar ikan/TPI), pelabuhan dan pantai. Tujuan dari Polmas Perairan itu sendiri pada dasarnya adalah untuk mendapatkan informasi atau kondisi masyarakat pantai (nelayan), memberikan bimbingan kepada masyarakat pantai (nelayan), dan untuk menjalin kemitraan antara Polisi dan masyarakat pantai di wilayah perairan Jawa Timur. Polmas perairan cenderung dilakukan ketika petugas sedang melakukan patroli dan menemukan beberapa nelayan di kapalnya, lalu petugas menghampiri dan mulai bertanya terkait dengan kegiatan mereka seperti apa dan secara tidak langsung petugas patroli mensosialisasikan peraturan terkait beberapa hal yang dilarang untuk dilakukan di wilayah perairan Polda Jatim.

b. Sambang Nusa.

Sambang nusa merupakan suatu kegiatan yang dilakukan Subditpatroliairud, dengan cara mengunjungi atau menyambangi secara langsung ke Pulau-pulau terluar di wilayah perairan Jawa Timur yang berpenduduk, yang sulit dijangkau dalam kegiatan patroli biasa sehari-hari. Sambang nusa terhadap pulau-pulau terluar bertujuan untuk meningkatkan informasi dua arah antara masyarakat dengan pihak Ditpolairud Polda Jatim terkait bahaya ataupun ancaman dari luar. Dalam kegiatan sambang nusa Subditpatroliairud menyempatkan untuk mensosialisasikan peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan larangan-larangan untuk melakukan tindak pidana konservasi terhadap satwa yang dilindungi karena keberadaannya yang terancam sangat punah serta eksploitasi pada SDA laut. Namun sekarang seiringnya perkembangan teknologi dan reformasi birokrasi prorgam kerja Kepolisian Air dan Udara tidak berpacu dengan penegakkan hukum namun kegiatan terobosan inovatif yang bisa mendobrak elektabilitas kepolisian perairan dan udara dengan program unggulan kakorpolairud kabaharkam polri yang memiliki visi misi untuk mencerdaskan bangsa dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pesisir wilayah Provinsi Jawa Timur yaitu memberikan dan menyediakan klinik terapung dan perpustakaan terapung serta bantuan sosial.

c. Pembinaan Keamanan Swakarsa Masyarakat Pesisir Pantai di wilayah Provinsi Jawa Timur (BIMKAMSA).

Secara keseluruhan Bimkamsa ini sama seperti Polmas Perairan dan Sambang Nusa, yang pada intinya Ditpolairud Polda Jatim memberikan pembinaan terkait pentingnya menjaga ekosistem laut, dan tidak melakukan tindak pidana dan/atau pelanggaran di wilayah perairan Polda Jatim dengan menamainya (CAKPOYAN yaitu cangkrukan para nelayan). DitPolairud Polda Jatim juga melakukan sosialisasi

terkait pentingnya menjaga laut kepada siswa-siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan pertimbangan bahwa siswa SMA telah memiliki pemahaman yang cukup terkait lingkungan hidup dan peraturan perundangan-undangan, serta pertimbangan lainnya adalah bahwa secara garis besar pekerjaan orangtua para siswa adalah nelayan. Sosialisasi ini diharapkan agar para siswa dapat memberitahukan kepada orangtuanya terkait apa yang telah dipelajari. DitPolairud Polda Jatim pun bekerjasama dengan LSM yang terkait dengan peduli lingkungan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dan juga BKSDA untuk sama-sama melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan hidup khususnya ekosistem laut.

Upaya Preventif merupakan bagian dari upaya non penal yang artinya jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat pencegahan atau penangkalan atau pengendalian sebelum suatu tindakan pelanggaran dan bahkan kejahatan itu terjadi. Mengingat bahwa upaya preventif merupakan upaya pencegahan suatu kejahatan, maka hal yang paling utama dilakukan adalah menangani faktor-faktor atau kondisi-kondisi sosial masyarakat yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menumbuhkan kejahatan (Zuleha 2017). Seharusnya upaya pencegahan atau preventif ini lebih diutamakan daripada upaya yang bersifat represif. Seperti pendapat yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik dari pada mengobati. Upaya preventif tidak jauh berbeda dengan upaya pre-emptif, pada dasarnya dimulai dengan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Djamin 1996). Selain dengan cara mensosialisasikan peraturan perundang-undangan, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Jatim secara langsung mengadakan kegiatan-kegiatan pencegahan secara nyata seperti melaksanakan kegiatan program kerja sapu bersih pantai yang dimana anggota kepolisian Air dan Udara membersihkan wilayah pesisir pantai yang kotor dengan mengajak turut serta masyarakat setempat dan mahasiswa yang magang.

Upaya represif merupakan upaya penanggulangan kejahatan. Salah satu usaha penanggulangan kejahatan adalah melalui sarana penal yakni menggunakan hukum pidana dan sanksinya (Laksana 2017). Upaya represif atau upaya penegakan hukum biasanya dilakukan oleh Unit Siintelair telah menemukan kapal yang melakukan tindak pidana dan/atau pelanggaran di wilayah perairan. Contohnya Siintelair Polda Jatim menemukan kapal nelayan berisi sejumlah penyu jenis penyu sisik yang menurut peraturan perundang-undangan merupakan hewan langka yang harus dilindungi, maka oleh Siintelair pelaku berserta barang bukti diserahkan ke Subditgakkum untuk kemudian dilakukan interogasi dan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian oleh Subditgakkum di proses, dalam hal ini jika terbukti bahwa perbuatan tersebut adalah tindak pidana, maka prosesnya akan dinaikan ke tingkat penyidikan, dan sebaliknya jika tidak terbukti biasanya dilakukan pembinaan (Hamzah 2004).



Gambar 1. Kegiatan Sambang Nusa di Pulau Mandangin Sampang Madura

Upaya edukatif yang dilakukan Polair dalam wujud edukatif adalah memberikan buku panduan nelayan yang berisi tata cara pengurusan dan pelayanan terhadap dokumen kapal nelayan baik ukuran di bawah 7 GT maupun di atas 7 GT, tata cara pengurusan dan pelayanan perizinan usaha perikanan serta tata cara penerbitan dan pelayanan surat keterangan kecakapan bagi nahkoda dan ABK kapal nelayan. Pemberian buku tersebut di atas kemudian ditindaklanjuti dengan pelatihan kecakapan bagi para nelayan yang ada di Pulau Mandangin, Kabupaten Sampang Madura.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak AKBP Budi Sulistyanto S.H., bahwa beliau mengatakan terdapat cukup banyak kendala yang dihadapi Ditpolairud Polda Jatim, dalam memberikan layanan dan menangani setiap tindak pidana dan/atau pelanggaran yang terjadi di wilayah perairan Polda Jatim. Adapun kendala-kendala tersebut sebagai berikut:

- a. Letak Geografis Jawa Timur Yang Sangat Luas. Berkaitan dengan letak geografis Jawa Timur yang sangat luas ini merupakan kendala yang paling fatal. Dikarenakan wilayah Jawa Timur yang terbelah sangat luas mulai dari ujung Perairan Kabupaten Sumenep dan Kota Banyuwangi, sampai dengan kabupaten Tuban dan Pacitan, hal ini menyebabkan Ditpolairud Polda NTT tidak dapat mengawasi secara keseluruhan melalui patroli sehari-hari.
- b. Kurangnya Kuantitas Personil Ditpolairud Polda Jatim. Jumlah personil Ditpolairud Polda Jatim berkisar di bawah 300 (Tiga ratus) personil beserta Pos Bko Satpolairud, kenyataan ini membuat Ditpolairud Polda Jatim cukup sulit untuk melakukan patroli pengawasan setiap harinya.
- c. Kurangnya Pemahaman Masyarakat. Sumber daya manusia masyarakat di wilayah Jatim masih terbilang masih cukup rendah, hal ini bisa dilihat dari banyak masyarakat yang masih kurang paham terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan satwa-satwa tertentu di wilayah perairan dan larangan untuk menangkap baik bagaimana cara penangkapan dengan alat yang diperbolehkan dengan sesuai kapasitas untuk di konsumsi maupun untuk di perdagangan. Masyarakat yang kurang mengetahui Undang-Undang ini disebabkan karena letak geografis masyarakat yang sulit dijangkau oleh Kepolisian apabila hendak melakukan sosialisasi.
- d. Serta kegiatan seperti Sambang Nusa hanya dilakukan setiap 1 bulan 1 kali dengan mengunjungi pulau-pulau terkecil yang ada di wilayah Jawa Timur dengan beberapa kategori pulau yang dikunjungi secara bergantian, seperti pulau pantauan dikunjungi setiap 2 bulan sekali dan pulau sentuhan setiap 1 bulan sekali.



Gambar 2. Foto kegiatan CAKPOYAN (Cangkrukan Para Nelayan)

D. PENUTUP

Kesimpulan

Pola Pengembangan Terobosan inovatif yang di lakukan Kepolisian Perairan Polda Jatim dalam Rangka Mendorong Eksistensi Kepolisian Perairan dengan Pelayanan publik program kerja Binmas air dan Potdirga melalui kegiatan Sambang Nusa telah membuktikan menjadi program unggulan kepolisian perairan dan udara dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pesisir di wilayah Pulau Mandangin Kabupaten Sampang Madura. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program kerja Binmas air dan Potdirga dalam melaksanakan tugas dan wewenang berkaitan dengan penanganan tindak pidana dan pelayanan publik yang terjadi di perairan, DitPolairud Polda Jatim melakukannya dengan empat upaya yakni Upaya Pre-Emtif, Upaya Preventif dan Upaya Represif, serta Edukatif. Adapun Program kerja yang dilakukan oleh DitPolairud Polda Jatim, adalah melakukan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang secara khusus ditangani oleh Subditpatroliairud. Program yang dilakukan oleh Subditpatroliairud terdiri dari Polmas Perairan, Sambang Nusa, dan Pembinaan Keamanan Swakarsa Masyarakat Pesisir (BIMKAMSA), terdapat yang menunjukkan dampak positif dari pendekatan ini terhadap masyarakat setempat.

Saran

Membuat pelatihan guna pengembangan kualitas SDM untuk meningkatkan pengetahuan. Kerjasama dinas/instansi pemerintah terkait lebih ditekankan lagi Agar Pemerintah Daerah mempersiapkan dukungan Fasilitas, konsep dan anggaran serta ahli dalam pelayanan publik yang prima terhadap nelayan dan penegakan hukum sehingga kegiatan Sambang Nusa tidak hanya dilakukan setiap 1 bulan sekali mengingat beberapa pulau kecil harus diberikan pelayanan yang ekstra agar tidak tertinggal.

DAFTAR PUSTAKA

- Mansur, Dikdik M. Arief, 2011, *Bunga Rampai Implementasi Tugas Pokok POLRI*, Bandung: LoGoz Publisihing.
- Winarno, Budi. 1989. *Teori Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pusat Studi Sosial Universitas Gadjah Mada,.
- Roberg, Roy R, 2013, *Police Management*, Terjemahan oleh PTIK, Jakarta.
- Taswin, *Kumpulan hasil laporan Polair Polda Banten sejak tahun 2000-2014*.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Runtutaku, J. (2016). *Tanggung jawab Polisi Perairan Dalam Menegakan Hukum di Wilayah Laut Teritorial Republik Indonesia*. *Lex et Societatis*, Vol.IV/No.1, 51-52.
- Windhu, P. K., Rodliyah, & Suryani, A. (2019).

Fungsi Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi di wilayah hukum Polisi Daerah Nusa Tenggara Barat). Jurnal Education and development, 202.

Maria Sisilia Lou Kelen, Setiyono, Teguh Suratman, Susianto. 2020. Upaya Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara (Ditpolairud) Polda Nusa Tenggara Timur Dalam Menangani Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam. Bhirawa Law Journal Volume 1, Issue 2, November 2020 ISSN PRINT xxx-xxx ISSN ONLINE xxx-xxx Journal homepage: <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/>

BUKU :

Djamin, A. (1996). Administrasi Kepolisian Republik Indonesia. Jakarta: Sanyata Sumansa Wira.

Rencana Kegiatan Subditpatroliairud Polda Jatim Tahun 2023-2024

Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Sambang Nusa Di Pulau Mandangin Kabupaten Sampang Madura Bualn April 2024